Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page 11850-11858

Analisis Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Nekamese Pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Sisimeni Sanam, Desa Ekateta, Kecamtan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

Diana Astuti Atok[1], Lusia Sulo Marimpan[2], Roni Haposan Sipayung[3], Nixon Rammang[4]
[1,2,3,4] **Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana**
Corresponding Author: Diana Astuti Atok, E-Mail: dianaatok6@gmail.com

Published: August, 2025

ABSTRAK

Kawasan hutan di Indonesia seringkali mengalami tekanan akibat keterbatasan ekonomi masyarakat sekitar yang mendorong pemanfaatan hutan secara ilegal. Oleh karena itu, program perhutanan sosial hadir sebagai solusi, memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Salah satu pelaksanaannya adalah melalui skema kemitraan kehutanan di KHDTK Sisimeni Sanam, yang membentuk KTH Nekamese sebagai mitra pengelola kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kelembagaan KTH Nekamese serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kelembagaan KTH Nekamese. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitan kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan terhadap 25 responden yang terdiri dari 16 anggota KTH dan 9 petugas kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan KTH Nekamese dianalisis berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 89 tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa KTH Nekamese telah memiliki sistem kelembagaan yang lengkap secara terstruktur, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Perkembangan kelembagaan dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti ketersediaan lahan, struktur organisasi, dan pendampingan dari penyuluh kehutanan. Namun demikian, kelembagaan belum berjalan optimal karena masih ditemui faktor penghambat seperti rendahnya partisipasi anggota, lemahnya pencatatan administrasi, serta usaha kelompok yang masih berskala kecil dan memiliki keterbatasan akses pasar.

Kata Kunci : Kelembagaan, KTH Nekamese, KHDTK Sisimeni Sanam

ABSTRACT

Forest areas in Indonesia are often experience pressure due to the limited economic capacity of surrounding communities, which leads to illegal forest utilization. Therefore, the social forestry program emerged as a solution, providing legal access for communities to manage forests sustainably. One of its implementations is through the forestry partnership scheme in the Special Purpose Forest Area (KHDTK) Sisimeni Sanam, which established the Nekamese Forest Farmer Group (KTH Nekamese) as a partner in managing the area. This study aims to analyze the institutional system of KTH Nekamese and identify the factors influencing its institutional development. The research uses a qualitative method with a descriptive approach, involving interviews and field observations of 25 respondents, consisting of 16 KTH members and 9 forestry officers. The results show that the institutional system of KTH Nekamese was analyzed based on main aspects: institutional management, area management, and business management, as stipulated in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 89 of 2018 concerning Guidelines for Forest Farmer Groups. These three aspects indicate that KTH Nekamese has a complete and structured institutional system, but its supported by factors such as land availability, organizational structure, and assistance from forestry extension officers. However, the institutional is not yet functioning optimally due to serveral inhibiting factors, such as low member participation, weak administrative recordkeeping, and small-scale group enterprises with limited market access.

Keywords : Institutional, Nekamese Forest Farmer Group, Sisimeni Sanam Special Purpose Forest Area

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hutan memiliki peran penting sebagai penyokong kehidupan dan penyedia berbagai sumber daya alam yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, di Indonesia, kawasan hutan sering menghadapi tekanan akibat tingginya angka kemiskinan masyarakat di sekitarnya, rendahnya pendidikan, serta lemahnya pengawasan pemanfaatan hutan (Dewi, 2018). Kemiskinan ini mendorong terjadinya perambahan dan eksploitasi hutan secara ilegal. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia membentuk program pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan hutan. Program ini didasari pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari. Salah satu skema dari program ini adalah Kemitraan Kehutanan yang dilaksanakan pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Sisimeni Sanam, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

KHDTK Sisimeni Sanam merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Wilayah VII. Kawasan ini berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kehutanan dengan luas wilayah mencapai ±2.973,20 Ha dan panjang kawasan 37,94 Km. Salah satu desa yang termasuk dalam kawasan KHDTK Sisimeni Sanam adalah Desa Ekateta, yang memiliki total luas wilayah sebesar 6.928 Ha dengan persentase terhadap luas kawasan hutan mencakup 690,36 Ha (23%) yang berada dalam kawasan hutan.

Dalam rangka mendukung program perhutanan sosial, pengelola kawasan membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai mitra dalam pengelolaan hutan secara partisipatif. Salah satunya adalah KTH Nekamese yang berdiri sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan No. 5630/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 tentang SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan berdasarkan SK No. 140/SK/DE.2017 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan Nekamese.

Permasalahan utama yang dihadapi KTH Nekamese terletak pada aspek kelembagaan. Meskipun telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Perkembangan kelembagaan kelompok ini masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Untuk keberhasilan suatu KTH sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan. Oleh karena itu, analisis terhadap sistem kelembagaan KTH Nekamese menjadi penting untuk memahami kondisi kelembagaan KTH Nekamese serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kelembagaan KTH Nekamese pada KHDTK Sisimeni Sanam.

METODE PENELITIAN

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2025. Lokasi penelitian bertempat di wilayah kerja KTH Nekamese yang berada di KHDTK Sisimeni Sanam, Desa Ekateta, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian antara lain alat tulis (bolpoin dan buku catatan), perekam suara *handphone*, kamera *handphone,* dan laptop. Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah kuesioner berupa panduan wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan mendalam kepada responden.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penentuan responden yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan jenis metode sensus lainnya yaitu sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, teknik ini digunakan karena jumlah sampel di bawah 30 orang (Amin *et al.,* 2023). Total responden pada penelitian ini adalah berjumlah 25 responden, terdiri dari seluruh anggota KTH Nekamese berjumlah 16 orang dan pengelola KHDTK Sisimeni Sanam berjumlah 9 orang. Data didapat dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder, melalui beberapa proses yaitu terdiri dari kegiatan wawancara dengan 25 responden dan obervasi lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif dari Miles dan Huberman, 1992 dikutip *dalam* (Hardani *et al.,* 2020). berikut tiga langkah analisis dari metode interaktif Miles dan Huberman yaitu:

1. Merangkum data/reduksi *(Reduction)*

Setelah semua data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menyaring dan menyederhanakan data. Proses ini bertujuan untuk menilai informasi penting, mengklasifikasikan data, dan menghilangkan hal-hal yang tidak relevan sehingga mempermudah penarikan kesimpulan.

2. Menampilkan data/penyajian data *(Display)*

Data kemudian disusun dengan cara yang jelas dan terstruktur agar memudahkan analisis serta kesimpulan. Data ditampilkan dalam bentuk ringkasan singkat sehingga peneliti dapat memahami keseluruhan isi penelitian atau bagian-bagian tertentu dengan lebih mudah.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan yang didasarkan pada analisis data. Kesimpulan ini merupakan hasil dari proses verifikasi dan menjadi temuan baru yang dihasilkan dari penelitian, yang sebelumnya belum diketahui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Kelembagaan KTH Nekamese

Sistem kelembagaan dalam KTH Nekamese dianalisis berdasarkan tiga aspek utama sesuai dengan Permen LHK Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan, yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa meskipun KTH Nekamese sudah memiliki struktur dan aturan dasar kelembagaan, penerapannya belum sepenuhnya berjalan baik. Kondisi seperti ini juga ditemukan dalam penelitian oleh Azizah *et.al.,* (2021) di KTH Waku Lani, yang menjelaskan bahwa kelembagaan kelompok cenderung masih lemah karena belum berjalan secara aktif. Sama seperti KTH Nekamese, kelemahan tersebut terjadi pada kurangnya perencanaan, pencatatan, dan pelaksanaan kegiatan yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan yang hanya terbentuk secara formal belum cukup tanpa adanya pendampingan dan dinamika kelompok yang baik.

1. Kelola Kelembagaan

Secara struktural, KTH Nekamese memiliki pengurus inti (ketua, sekretatis, dan bendahara) serta satu seksi unit usaha. Struktur ini dilengkapi dengan dokumen formal seperti Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tanggah (ART) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan kelompok. Dalam hal administrasi, kelompok memiliki beberapa dokumen dasar seperti buku tamu, buku kas, dan notulen rapat.

2. Kelola Kawasan

KTH Nekamese memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan melalui skema kemitraan kehutanan dengan KHDTK Sisimeni Sanam. Kelompok mengelola dua jenis lahan yaitu areal kemitraan kehutanan sebagai lahan milik pribadi anggota yang terletak di sekitar tempat tinggal anggota, luas areal kemitraan ini mencapai ±7,52 Ha dan demplot wanatani seluas ±0,39 Ha yang berfungsi sebagai lahan percontohan untuk sistem agroforestry di KHDTK Sisimeni Sanam.

Tabel 1. Jenis Tanaman Pada Areal Kemitraan Kehutanan

Jenis Tanaman	Nama Ilmiah
Tanaman Pertanian	
Jagung	*Zea mays*
Pisang	*Musa paradisiaca*
Ubi	*Ipomoea batatas L.*
Kacang tanah	*Arachis hypogaea*
Pepaya	*Carica papaya*
Tanaman Kehutanan	
Asam	*Tamarindus indica*
Kelapa	*Cocos nucifera*
Nangka	*Artocarpus heterophyllus*
Srikaya	*Annona squamosal*

Tanaman yang tumbuh di lahan terdiri dari tanaman pertanian dan tanaman kehutanan. Tanaman pertanian dikelola langsung oleh anggota karena dapat memberikan hasil dalam waktu yang singkat dan hasil panen tidak diperjualbelikan, melainkan hanya digunakan untuk konsumsi sehari-hari keluarga. Oleh karena itu, pemanenan dari tanaman pertanian lebih sering dilakukan. Masing-masing anggota menanam berbagai jenis tanaman pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara tanaman kehutanan tumbuh tersebar di lahan secara alami dengan jumlahnya tidak banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan masih lebih diarahkan pada tanaman yang cepat menghasilkan, sedangkan tanaman kehutanan belum dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2. Jenis Tanaman Pada Demplot Wanatani

Jenis Tanaman	**Nama Ilmiah**
Tanaman Pertanian	
Jagung	*Zea mays*
Cabai rawit	*Capsicum frutescens L.*
Tomat	*Solanum lycopersicum*
Kacang hijau	*Vigna radiata*
Ubi	*Ipomoea batatas L.*
Kunyit	*Curcuma longa*
Pisang	*Musa paradisiaca*
Pepaya	*Carica papaya*
Porang	*Amorphophallus muelleri*
Tanaman Kehutanan	
Asam	*Tamarindus indica*
Kelapa	*Cocos nucifera*
Jambu mete	*Anacardium occidentale*
Srikaya	*Annona squamosal*
Jeruk Nipis	*Citrus aurantifolia*
Mangga	*Mangifera indica*
Jambu biji	*Psidium guajava*
Pinang	*Areca catechu*
Jati	*Tectona grandis*
Turi	*Sesbania grandiflora*
Mahoni	*Swietenia mahagoni*
Cendana	*Santalum album*
Gamal	*Gliricidia sepium*

Demplot wanatani yang dikelola oleh KTH mengalami berbagai kendala dalam pengelolaannya, yang berdampak pada pertumbuhan tanaman yang tidak optimal. Beberapa tanaman mengalami pertumbuhan yang terhambat atau bahkan tidak bertahan lama. Salah satu faktor utama adalah terhentinya pasokan air, akibat kerusakan pipa yang terjadi saat perbaikan jalan raya umum di dekat lahan. Meskipun terdapat bak penampung air yang cukup besar, air tidak dapat disalurkan ke lahan karena pipa yang rusak belum diperbaiki. Akibatnya, anggota hanya mengandalkan air hujan yang ditampung dalam drum, yang tidak mencukupi terutama di musim kemarau.

3. Kelola Usaha

Dalam aspek kelola usaha, KTH Nekamese saat ini menjalankan dua bentuk usaha yaitu produk olahan dan penjualan hasil panen. Produk olahan yang dihasilkan saat ini adalah keripik pisang dan sambal Lu'at. Setiap produk dijual dengan harga yang berbeda, keripik pisang tersedia dalam tiga varian rasa, yaitu manis, balado, dan asin dengan harga Rp. 10.000 per bungkus, sedangkan sambal lu'at Rp. 5.000 per bungkus. Pemasaran produk dilakukan melalui dua lapak yang berlokasi di pinggir jalan raya umum, tepatnya di depan kantor KHDTK Sisimeni Sanam. Namun, jumlah pembeli masih terbatas, sehingga tingkat penjualan belum optimal. Untuk meningkatkan pemasaran, pendamping kelompok turut membantu menjual produk ke Kota Kupang, khususnya pada setiap hari Sabtu di *Car Free Day* (CFD). Selain produk olahan, KTH juga menjual hasil panen dari lahan demplot wanatani. Jenis tanaman yang dijual, yaitu cabai rawit (Rp.50.000/kg), tomat (Rp.30.000/bakul), ubi (Rp.10.000/ikat), dan papaya (Rp.5.000/buah). Dari hasil wawancara, anggota KTH menyampaikan bahwa hasil panen dari lahan demplot wanatani menjadikan sumber pendapatan tambahan bagi mereka, meskipun dalam jumlah yang masih terbatas. Proses penjualan dilakukan secara langsung oleh anggota, baik dengan membawa hasil panen ke pasar maupun dijual kepada pembeli yang datang ke lahan wanatani. Siklus tanam dan panen di lahan berlangsung dalam jangka waktu sekitar tiga bulan, dimana penanaman biasanya dilakukan pada bulan Juni dan panen dibulan September. Namun, hasil panen sering kali atau bahkan sekarang tidak optimal akibat kondisi lahan yang kurang mendukung.

Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kelembagaan KTH Nekamese

Keberlanjutan kelembagaan KTH Nekamese dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan ke dalam aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Setiap aspek memiliki faktor pendukung yang memperkuat keberlanjutan kelompok serta faktor penghambat yang masih menjadi tantangan dalam pengelolaan KTH. Faktor pendukung mencerminkan bagian-bagian yang telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kelompok, sedangkan faktor penghambat menunjukkan kendala yang perlu diperhatikan atau bahkan perlu diselesaikan agar kelembagaan KTH dapat berkembang lebih optimal.

1. Faktor Yang Mempengaruhi Kelola Kelembagaan

Tabel 3. Faktor Yang Mempengaruhi Kelola Kelembagaan

Kategori	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kepatuhan Terhadap Aturan	Adanya AD/ART yang telah mengatur kelembagaan secara menyeluruh dan menjadi pedoman dalam pengelolaan kelompok.	Beberapa anggota masih melanggar aturan, seperti pembakaran lahan tanpa sekat bakar dan tidak mengikuti pertemuan rutin.
Penegakan Peraturan Kelompok	Terdapat sanksi bagi pelanggaran aturan, termasuk denda dan teguran tertulis.	- Mekanisme penegakan aturan masih lemah, sehingga sanksi seperti denda tidak berjalan efektif.

		- Pengawasan oleh pengurus belum berjalan optimal untuk memastikan aturan dipatuhi.
Administrasi	Memiliki AD/ART dan RKT sebagai pedoman organisasi dan 4 buku administrasi.	- Pencatatan administrasi belum lengkap (daftar anggota, pemisahan notulen rapat dan pencatatan hasil kegiatan) - Pencatatan data anggota masih dilakukan oleh pendamping, belum sepenuhnya dikelola oleh pengurus sendiri (sekretaris)
Tata kelola keuangan	Kas kelompok sudah berjalan dan bisa membantu anggota dengan kebutuhan mendesak.	Peminjaman kas tidak melalui prosedur resmi dan belum melibatkan semua pengurus.
Fasilitas sekretariat	Sekretariat KTH Nekamese berada di demplot wanatani sebagai pusat kegiatan kelompok.	- Pondok pertemuan belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti tempat duduk, dapur permanen, dan fasilitas. - Papan nama KTH telah dicabut dan belum ada pemasangan pada kepengurusan terbaru.

Kelola kelembagaan KTH Nekamese dipengaruhi oleh lima kategori, yaitu kepatuhan terhadap aturan, penegakan peraturan kelompok, administrasi, tata kelola keuangan, dan fasilitas sekretariat. Faktor pendukung yang paling menonjol adalah tersusunnya dokumen kelembagaan seperti AD/ART dan RKT, tersedianya sistem administrasi dasar kelompok, serta keberadaan secretariat kelompok di demplot wanatani. Sanksi atas pelanggaran juga telah ditetapkan dalam bentuk denda dan teguran tertulis. Namun, implementasi kelembagaan masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kepatuhan anggota terhadap aturan seperti ketidakhadiran anggota pada rapat dan pembakaran lahan tanpa sekat bakar, lemahnya mekanisme penegakan sanksi , administrasi yang belum tertata rapi dan masih bergantung pada pendampingan, serta prosedur peminjaman kas yang belum melibatkan seluruh pengurus. Fasilitas secretariat pun masih terbatas, ditandai dengan minimnya sarana pendukung seperti tempat duduk, dapur, dan belum adanya papan nama kepengurusan terbaru.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kelola Kawasan

Tabel 4. Faktor Yang Mempengaruhi Kelola Kawasan

Kategori	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Akses Legal	Adanya akses legal untuk mengelola kawasan hutan melalui program perhutanan sosial yaitu skema kemitraan kehutanan di bawah naungan BP2SDM Wilayah VII.	-
Sarana dan Prasarana	- Adanya areal kemitraan kehutanan dan demplot wanatani yang dapat dikelola.	

	- Dalam demplot wanatani tersedia bak penampung air serta toilet.	-
Manajemen Lahan	Ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan.	Kurangnya aktivitas pembersihan lahan.
Partisipasi Anggota dalam Pengelolaan Kawasan	Sebagian anggota aktif dalam kegiatan pengelolaan lahan, sekitar 6-9 orang.	Kurangnya keterlibatan anggota dalam pengelolaan lahan

Berdasarkan kondisi lapangan yang telah diidentifikasi. dapat disimpulkan bahwa kelola kawasan telah memiliki landasan yang cukup baik terutama dari sisi legalitas dan pemahaman batas-batas wilayah kelola. Namun, keberhasilan pengelolaan belum tercapai sepenuhnya karena masih lemahnya pelibatan anggota dan kurangnya konsistensi dalam kegiatan lapangan. Penguatan peran setiap anggota serta dukungan teknis dan evaluasi yang berkala sangat diperlukan agar pengelolaan kawasan dapat berjalan lebih terarah.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kelola Usaha

Tabel 5. Faktor Yang Mempengaruhi Kelola Usaha

Kategori	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Bimbingan Teknis Usaha	Adanya bimbingan teknis dari penyuluh kehutanan terkait pengelolaan usaha dari hasil lahan.	-
Pemanfaatan Sumber Daya	Selain tanaman pertanian yang diutamakan dalam lahan, ada juga tersedianya jenis tanaman kehutanan MPTS yang memberikan potensi pengembangan produk berbasis hasil hutan bukan kayu.	Kurangnya pemanfaatan pada tanaman kehutanan MPTS sebagai peluang usaha.
Fasilitas Produksi	Petugas kehutanan memberikan dukungan berupa ijin untuk kelompok melakukan produksi usaha di dapur milik kantor KHDTK Sisimeni Sanam dan bantuan alat masak untuk usaha.	Belum ada tempat untuk memproduksi usaha yang khusus dan permanen, seperti dapur KTH sendiri.

Kelola usaha KTH Nekamese dipengaruhi oleh tiga kategori, yaitu pelatihan dan pendampingan, fasilitas usaha, serta partisipasi anggota. Pada kategori pelatihan dan pendampingan, kelompok didukung oleh bantuan alat masak dan pelatihan dari penyuluh kehutanan sebagai faktor pendukung. Dalam kategori fasilitas usaha, adanya dapur sementara dari KHDTK menjadi pendukung awal kegiatan produksi, namun belum tersedianya dapur produksi permanen menjadi hambatan utama. Sementara itu, pada kategori partisipasi anggota, keberadaan tanaman kehutanan yang merupakan jenis MPTS menjadi peluang usaha, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, ditambah dengan rendahnya partisipai anggota dalam kegiatan usaha yang hanya melibatkan sebagian kecil dari jumlah keseluruhan anggota.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan beberapa proses untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dan akurat mengenai topik yang diteliti.

1. Sistem kelembagaan KTH Nekamese terdiri atas tiga aspek utama pengelolaan yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Dari sisi kelola kelembagaan, KTH Nekamese memiliki struktur organisasi dan aturan tertulis berupa AD/ART yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme rapat dan pengambilan keputusan, RKT sebagai gambaran rangkaian kegiatan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam aspek kelola kawasan, kelompok telah mengelola dua jenis lahan yaitu areal kemitraan dan demplot wanatani. Sementara itu, kelola usaha dilaksanakan melalui pemanfaatan hasil lahan untuk konsumsi sehari-hari dan pengembangan usaha kelompok. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa KTH Nekamese telah memiliki sistem kelembagaan yang lengkap secara terstruktur, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, sehingga sistem kelembagaan yang ada belum berjalan sesuai dengan fungsinya secara maksimal.
2. Perkembangan kelembagaan KTH Nekamese dipengaruhi oleh berbagai faktor dari ketiga aspek utama pengelolaan KTH tersebut yaitu, ditemukan adanya faktor pendukung seperti tersedianya lahan kelola, adanya struktur organisasi, dan dukungan pendampingan dari penyuluh kehutanan BP2SDM Wilayah VII. Namun, juga terdapat faktor penghambat seperti rendahnya partisipasi anggota, lemahnya pencatatan administrasi, dan usaha kelompok yang belum dikelola secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, I. N. (2018). Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Dan Program Perhutanan Sosial. 15(2), 65–77.

Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. Jurnal Pilar, 14(1), 15–31.

Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.

Azizah, L., Ichsan, A. C., & Webliana, K. (2021). Analisis Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Waku Lani Desa Lenek Duren Dan Desa Toya Lombok Timur. Jurnal Sylva Scienteae, 4(1), 84.